

**KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MASYARAKAT DALAM  
MEMBAYAR RETRIBUSI KEBERSIHAN PADA TAHAP KOLEKTOR  
DI LINGKUNGAN PERUMAHAN KOTA PEMALANG**

**RINGKASAN TESIS**

Oleh :

**GHOZINUN NAJIB**  
L4D004080



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**ABSTRAK**  
**KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MASYARAKAT DALAM**  
**MEMBAYAR RETRIBUSI KEBERSIHAN PADA TAHAP KOLEKTOR**  
**DI LINGKUNGAN PERUMAHAN KOTA PEMALANG**

**Oleh: Ghozinun Najib**

*Pengelolaan sampah di Indonesia dilakukan dengan sistem kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pengelolaan sampah di Kota Pemalang saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah dibawah tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai sektor publik. Sedangkan pengelolaan sampah pada tahap kolektor di lingkungan perumahan dilakukan dengan konsep informal yaitu pengangkutan individu tanpa ada perjanjian mengikat. Kondisi ini mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan sampah pada tahap kolektor sehingga diperlukan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah sering terbentur oleh keterbatasan pembiayaan yang berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya. Sehingga membayar retribusi kebersihan dapat dijadikan langkah awal dalam memperbaiki kondisi kebersihan lingkungan di Kota Pemalang. Pembayaran retribusi ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat seperti jumlah nominal yang disepakati sehingga hasil pengelolaan kebersihan menjadi nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan pada tahap kolektor di lingkungan perumahan Kota Pemalang.*

*Hasil analisis yang diperoleh adalah bahwa persepsi masyarakat tentang pengelolaan sampah cukup baik dari sumber sampah sampai ke TPS. Sedangkan hasil studi CVM yang telah dilakukan, menghasilkan nilai WTP rata-rata adalah Rp 1.900,00/bulan/ keluarga. Sedangkan nilai ATP rata-rata adalah Rp 4.300,00/bulan/keluarga. Hasil analisis ini diatas nilai standar yang diusulkan pemerintah yaitu Rp 1.000,00/bulan/keluarga dan merupakan sebuah potensi ekonomi dan sosial dalam masyarakat, dimana kemampuan ekonomi masyarakat dalam membayar retribusi sampah mampu menjadi daya tarik bagi pihak swasta untuk bergabung dalam pengelolaan sampah pada tahap kolektor di lingkungan perumahan di Kota Pemalang. Pihak swasta akan mendapat keuntungan pada bulan ke 2 – 6 dengan nilai ATP Rp 3.500,00 dan nilai WTP Rp 1.900,00 dengan jangkauan pelayanan 450 KK.. Adapun rekomendasi yang penting untuk Pemerintah Kota Pemalang adalah perlu disusun suatu regulasi dan kebijakan baru tentang pengaturan besar biaya retribusi berdasarkan pada kemampuan dan kemauan masyarakat.*

***Kata Kunci: kemampuan, kemauan, pengelolaan, sampah***

**PENDAHULUAN**

Fenomena peningkatan jumlah penduduk, kelangkaan lahan, peningkatan kebutuhan sarana prasarana serta tidak tanggapnya pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana permukiman yang layak dan memadai, secara tidak langsung akan mengakibatkan adanya kecenderungan peningkatan limbah/buangan yang dihasilkan oleh penduduk di kawasan tersebut. Persampahan perkotaan akan selalu mendapat perhatian pemerintah, karena penanganan persampahan yang tidak optimal justru akan menimbulkan masalah baru di perkotaan. Menanggapi ancaman kerusakan lingkungan akibat peningkatan jumlah sampah tersebut, maka pemerintah memerlukan manajemen pengelolaan sampah perkotaan.

Pengelolaan sampah di lingkungan perumahan Kota Pemalang dilaksanakan oleh perorangan yaitu tukang sampah. Hal ini sebagai implementasi dari Perda Kabupaten Pemalang No.10 Th 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, bahwa pengangkutan sampah dari sumber sampah (rumah tangga) ke TPS (tahap kolektor) menjadi tanggung jawab konsumen, sedangkan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pengolahannya di TPA, merupakan tugas pemerintah (DPU). Kondisi ini memicu munculnya permasalahan antara lain tidak teraturnya pengambilan sampah dari sumber sampah, tidak terangkutnya semua timbulan sampah di sumber sampah, buruknya kualitas sarana pengangkut sampah, dan terbatasnya